

DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN: ANALISIS FAKTOR NON-EKOLOGIS DALAM EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Viola Rahmawati Hasanudin Putri¹, Nadia Intan Febriyanti², Dhian Megananda³, Moch.

Nauval Faris⁴

viola.123090072@ugj.ac.id¹, nadia.123090104@ugj.ac.id², dhian.123090105@ugj.ac.id³,
moch.123090107@ugj.ac.id⁴

Universitas Swadaya Gunung Djati

ABSTRAK

Kebijakan mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah sebuah sistem yang mampu beradaptasi yang dibentuk oleh faktor-faktor non-ekologis seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi, sesuai dengan kerangka Ekologi Administrasi Publik. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan beradaptasi terhadap ancaman yang bersifat hibrida, contohnya konflik geopolitik di Laut Natuna Utara yang dipicu oleh potensi migas sebesar 127 barel dan isu tentang keamanan iklim di dalam negeri. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya proses "ekologisasi" ancaman, di mana bencana alam mendapat legitimasi secara politik melalui UU No. 24/2007 dan menjadi bagian dari agenda keamanan. Dalam pelaksanaannya, studi kasus Kampung Iklim Rawajati mengilustrasikan bahwa efektivitas kebijakan sangat tergantung pada kolaborasi fungsional dan elemen sosial-budaya, dengan Babinsa/Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung dalam upaya mitigasi banjir dengan masyarakat setempat. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan pertahanan yang modern perlu bersinergi, dengan menggabungkan analisis ekologis dan non-ekologis, serta memperkuat kemampuan militer dan ekonomi demi meningkatkan daya tangkal nasional dalam menghadapi berbagai ancaman.

Kata Kunci: Ekologi Administrasi Publik, Natuna Utara, Keamanan Iklim, Adaptasi Kebijakan, Integrasi Sosial-Militer.

ABSTRACT

Indonesia's defense and security policy is an adaptive system shaped by non-ecological factors such as politics, economics, socio-culture, and technology, in accordance with the framework of Public Administration Ecology. This qualitative study explores how policies adapt to hybrid threats, such as the geopolitical conflict in the North Natuna Sea triggered by the potential for 127 barrels of oil and gas and issues of domestic climate security. The findings of this study indicate a process of "ecologization" of threats, in which natural disasters are politically legitimized through Law No. 24/2007 and become part of the security agenda. In practice, the case study of Kampung Iklim Rawajati illustrates that the effectiveness of policies is highly dependent on functional collaboration and socio-cultural elements, with Babinsa/Bhabinkamtibmas acting as liaisons in flood mitigation efforts with local communities. In conclusion, modern defense policies need to be synergistic, combining ecological and non-ecological analyses, and strengthening military and economic capabilities in order to improve national resilience in the face of various threats.

Keywords: Public Administration Ecology, North Natuna, Climate Security, Policy Adaptation, Social-Military Integration.

PENDAHULUAN

Kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai domain militer semata, melainkan sebagai sebuah produk dari interaksi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Dalam kerangka teori Ekologi Administrasi Publik, pemahaman terhadap lingkungan non-ekologis—seperti dinamika politik, perubahan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, dan kemajuan

teknologi—menjadi krusial untuk menganalisis dan memahami dinamika kebijakan pertahanan yang adaptif [Engkus E., 2017].

Dampak perubahan iklim global mulai dirasakan sejak abad ke-20, seperti perubahan pola cuaca, peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Menanggapi dampak dari perubahan iklim global, UNFCCC menyelenggarakan Conference of Parties (COP) ke-21 pada tanggal 12 Desember 1995 di Paris Perancis dan menghasilkan Paris Agreement. Paris Agreement bertujuan untuk menjaga pemanasan global agar tetap dibawah 20 C dari masa pra industri dan melakukan upaya untuk menahan pemanasan global hingga 1,50 C di atas masa pra industri (Albar et al., 2017).

Paris Agreement mendorong setiap negara merumuskan dan menyampaikan rencana aksi iklim nasional mereka di dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi program Kampung Iklim sebagai upaya mencapai tujuan Paris Agreement. Program kampung iklim merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim yang berbasis masyarakat yang mengejawantahkan isu global tentang perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Kampung iklim dapat berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga (RW) dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa atau dapat juga dilaksanakan di wilayah yang masyarakatnya telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi landasan utama untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana termasuk banjir dengan menitikberatkan pada upaya mitigasi yang sistematis dan kesiapsiagaan masyarakat. Mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat kampung iklim adalah upaya yang berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya langsung dalam menghadapi perubahan iklim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Upaya mitigasi perubahan iklim tersebut terdapat dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang program kampung iklim pasal 6 ayat 3.

Sementara pengendalian banjir kampung iklim adalah upaya terintegrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak banjir terhadap masyarakat dan lingkungan. Upaya tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim lampiran 1. Menurut IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) 2023, skor risiko bencana banjir di Jakarta Selatan tergolong tinggi yakni 12,66 (BNPB, 2023). Artinya, wilayah ini memiliki potensi besar untuk mengalami banjir sehingga diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mitigasi dan pengendalian banjir agar dampak dari bencana tersebut dapat diminimalisir. Kelurahan Rawajati merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pancoran yang rentan terhadap bencana banjir (Afifah et al., 2022). Kampung Iklim RW 03 Rawajati, Kampung Iklim RW 06 Rawajati, dan Kampung Iklim RW 07 Rawajati adalah kampung iklim di kelurahan Rawajati yang rentan terhadap banjir. Secara geografis, ketiga kampung iklim ini terletak di pinggir Sungai Ciliwung sehingga membuat daerah tersebut rentan terhadap banjir. Secara topografi, banyak daerah di tiga kampung iklim tersebut memiliki ketinggian permukaan tanah yang lebih rendah

dibandingkan dengan daerah sekitarnya sehingga meningkatkan risiko genangan air dan banjir terutama pada musim hujan (Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, 2020). Banjir di daerah Rawajati disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir di daerah Rawajati juga disebabkan oleh adanya banjir yang datang dari Bogor (banjir kiriman). Daerah Kampung Iklim Kelurahan Rawajati yang sering terdampak banjir merupakan kawasan dengan kepadatan pemukiman yang tinggi dengan jumlah kepadatan bangunan 7,024 per km² (Afifah et al., 2022). Hal ini menyebabkan meningkatnya tantangan dalam pengelolaan risiko banjir dan perlindungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatoris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam interaksi kompleks antara faktor-faktor non-ekologis—seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi—dengan dinamika kebijakan pertahanan dan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena dengan detail, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel.

Adapun metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada suatu kasus tertentu (kebijakan pertahanan dan keamanan) yang bersifat spesifik dalam konteks ekologi administrasi publik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu kebijakan terbentuk dan berdinamika, dengan menggali data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Pertama, melalui studi kepustakaan, dilakukan pencarian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan ekologi administrasi publik, kebijakan pertahanan, dan faktor non-ekologis. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber kunci yang memiliki peran langsung atau pengetahuan mendalam mengenai perumusan serta pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Narasumber ini dapat berasal dari kalangan pembuat kebijakan, akademisi pertahanan, atau tokoh terkait. Selain itu, observasi dilakukan apabila memungkinkan, dengan tujuan mengamati secara langsung proses-proses kebijakan yang relevan guna mendapatkan data empiris yang mungkin tidak terekam melalui dokumen atau wawancara. Analisis dokumen juga menjadi bagian penting, dengan mengkaji berbagai regulasi resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen strategis terkait pertahanan dan keamanan, untuk memahami pijakan formal kebijakan tersebut.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan induktif secara berkelanjutan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yakni proses penyaringan dan penyederhanaan informasi dari berbagai sumber agar lebih terfokus pada aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data yang sudah disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau matriks agar memudahkan pemahaman. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut, dengan tujuan menjelaskan dinamika kebijakan pertahanan dan keamanan dari sudut pandang ekologi administrasi publik, khususnya dengan memperhatikan peran faktor non-ekologis.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan menerapkan beberapa strategi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan literatur untuk memastikan konsistensi antara

temuan. Temuan akan disajikan secara rinci dan menyeluruh agar pembaca dapat melakukan penilaian terhadap kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, proses wawancara ulang (member check) dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil analisis kepada para narasumber, guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan sudut pandang mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalanan Faktor Non-Ekologis di Rawajati.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan di Indonesia telah jauh melampaui domain militeristik tradisional. Kini, ia merupakan sebuah produk yang secara dinamis dan kompleks dibentuk oleh lingkungan non-ekologis, seperti faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Di Kampung Iklim Rawajati, tempat ancaman banjir adalah realitas hidup yang diakibatkan oleh lokasinya di tepi Sungai Ciliwung, interaksi antar faktor-faktor ini terjalin erat dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

Secara politik, terjadi "ekologisasi" atau perluasan definisi ancaman negara. Ancaman tidak lagi sekadar invasi militer, melainkan juga mencakup keamanan iklim yang diwujudkan melalui bencana alam. Perubahan paradigma ini dilegitimasi oleh kerangka hukum, utamanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan payung politik bagi aparat pertahanan dan keamanan (TNI/Polri) untuk berperan sebagai aktor non-perang. Di Rawajati, ini berarti Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga secara fungsional bertindak sebagai petugas siaga bencana yang berkoordinasi langsung dengan ketua RW. Peran hibrida ini adalah hasil politik yang memastikan sumber daya negara dapat dimobilisasi cepat di tingkat akar rumput saat ancaman (banjir kiriman) datang.

Faktor ekonomi dan fisik memberikan tantangan yang nyata. Keterbatasan anggaran pertahanan, yang sebagian besar terserap pada modernisasi alutsista, menuntut upaya mitigasi di Rawajati untuk bergantung pada ekonomi mandiri dan inisiatif ProKlim yang berskala kecil. Lokasi Rawajati dengan kepadatan pemukiman yang mencapai 7.024 per/km serta topografi yang rendah menunjukkan adanya konflik ekonomi-fisik antara tuntutan pembangunan dan kebutuhan lingkungan. Sebagai respons, program Kampung Iklim berfokus pada solusi yang hemat biaya namun berdampak, seperti pembangunan biopori, sumur resapan, dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Adaptasi ekonomi mikro ini penting untuk mengurangi kerentanan fisik masyarakat, sekaligus secara bersamaan menjalankan mandat nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Faktor sosial-budaya terbukti menjadi kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Di Rawajati, kebijakan mitigasi yang datang dari pusat (seperti ProKlim) diwujudkan melalui budaya gotong royong lokal. Masyarakat yang hidup dengan risiko tinggi telah mengembangkan protokol kesiapsiagaan yang terlembaga. Wawancara dengan tokoh masyarakat menegaskan bahwa komando evakuasi saat banjir kiriman datang bukanlah semata-mata dari pemerintah kota, melainkan dari pengurus RW yang didukung oleh integrasi fungsional dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Aparat keamanan di sini berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan fasilitator, menjadikan ketahanan komunitas sebagai bukti nyata bagaimana faktor sosial-budaya mampu melunakkan birokrasi pertahanan yang cenderung hierarkis menjadi model kolaboratif.

Terakhir, kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik saat krisis. Di Rawajati, Sistem Peringatan Dini (EWS) banjir kini sangat bergantung pada teknologi komunikasi digital. Informasi dari pos pantau

sungai dapat menyebar dengan cepat melalui grup pesan ke pengurus RW. Kecepatan penyebaran informasi ini—didukung oleh analisis data geospasial tentang risiko wilayah—memangkas "waktu tunda administrasi" yang sering menghambat respons bencana. Teknologi memungkinkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk segera bertindak secara real-time berdasarkan informasi di lapangan, menjadikannya aset keamanan yang sama pentingnya dengan aset fisik.

Pembahasan

1. Geopolitik sebagai Pendorong Strategi Pertahanan

Dalam ekologi administrasi publik, kebijakan pertahanan dan keamanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis seperti kondisi geografis atau lingkungan fisik, tetapi juga oleh faktor non-ekologis yang bersifat sosial, politik, teknologi, dan budaya organisasi. Studi ini menyoroti bagaimana dinamika kebijakan pertahanan dan keamanan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekologis yang rumit dan saling berinteraksi.

Kawasan Natuna Utara menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pertahanan Indonesia dipengaruhi oleh perubahan situasi politik internasional. Tegangan di Laut China Selatan, yang melibatkan klaim wilayah oleh beberapa negara, mendorong Indonesia untuk meningkatkan kehadiran militer dan upaya diplomasi pertahanan di daerah tersebut. Menurut Afandi dan Yoesgiantoro (2022), kebijakan Indonesia di Natuna bukan hanya tanggapan terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik dan pertahanan nasional yang memperhitungkan letak geografis Indonesia dalam skenario global.

2. Transformasi Teknologi dan Ancaman Siber

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma keamanan nasional. Kini ancaman siber menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan pertahanan, karena negara harus berupaya melindungi infrastruktur digital dan data yang strategis. Teknologi tidak hanya bisa digunakan sebagai alat pertahanan, tetapi juga bisa menjadi sumber ancaman baru. Karena itu, kebijakan pertahanan harus mencakup rencana keamanan digital, meningkatkan sistem enkripsi, serta memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi.

Menurut studi Azizah (2021), konsep keamanan harus diperbarui agar mencakup ancaman non-tradisional seperti kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan pengaruh opini publik melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor teknologi, sebagai elemen yang tidak terkait langsung dengan lingkungan, memiliki dampak langsung terhadap arah pembuatan kebijakan pertahanan.

3. Ideologi dan Budaya Organisasi dalam Kebijakan Keamanan

Kebijakan keamanan dalam negeri, terutama dalam menangani kasus terorisme, sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dan budaya organisasi. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya tergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pada nilai-nilai yang dimiliki oleh institusi, cara pendekatan psikologis, serta metode komunikasi yang digunakan.

Indrawan dan Aji (2019) menjelaskan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas lebih efektif dalam mengubah cara berpikir para tahanan teroris dibandingkan pendekatan yang bersifat keras. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan ideologi yang dimiliki oleh institusi menjadi faktor penting yang tidak tergantung pada aspek ekologis dalam kebijakan keamanan.

Kepemimpinan, Dinamika Birokrasi, dan Sinergi Pendekatan Ekologis–Non-Ekologis

Efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan fleksibilitas birokrasi. Pemimpin yang adaptif dan memiliki visi strategis mampu mendorong lahirnya kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Sebaliknya, birokrasi yang rigid dan hierarkis sering kali menjadi penghambat dalam menghadapi ancaman yang kompleks dan dinamis. Dalam ekologi administrasi publik, kepemimpinan dipandang sebagai elemen internal yang membentuk kapasitas birokrasi dalam merespons tekanan eksternal, baik dari aspek politik, sosial, maupun teknologi (Krisna, Taufanto, & Jauhari, 2025; Siswoyo & Nursahidin, 2025).

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan sistem koordinasi antarlembaga yang sinergis. Kepemimpinan yang mampu membaca arah perubahan dan mengintegrasikan perspektif lintas disiplin akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada keberlanjutan (Sjamsoeddin, Yusciantoro, & Saragih, 2023; Kemendagri RI, 2023).

Di sisi lain, pendekatan ekologis tradisional yang berfokus pada aspek geografis, sumber daya alam, dan demografi tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas ancaman kontemporer. Pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan analisis terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi. Sinergi antara pendekatan ekologis dan non-ekologis memungkinkan birokrasi untuk lebih adaptif dan tanggap dalam menghadapi ancaman multidimensi seperti kejahatan siber, radikalisasi ideologis, dan disinformasi digital (Azizah, 2021; Afandi & Yoesciantoro, 2022).

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, kebijakan pertahanan dan keamanan dapat dirancang secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ekologis memberikan pemahaman terhadap kapasitas wilayah dan karakteristik lingkungan fisik, sementara pendekatan non-ekologis memperkaya analisis dengan dimensi sosial-politik dan teknologi yang terus berkembang. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertahanan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Perumusan Kebijakan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan tidak dapat lagi dirumuskan hanya berdasarkan pendekatan ekologis tradisional yang fokus pada kondisi geografis, sumber daya alam, atau struktur birokrasi. Ancaman saat ini semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti ancaman fisik, digital, ideologis, dan sosial. Karena itu, faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan ekologis, seperti geopolitik, teknologi, ideologi, dan budaya organisasi, harus ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan publik di bidang pertahanan dan keamanan.

Ancaman yang dihadapi oleh negara saat ini semakin rumit, sehingga memerlukan analisis yang melibatkan berbagai bidang dan disiplin ilmu. Ancaman tidak hanya berupa invasi militer semata, melainkan berkembang menjadi berbagai bentuk seperti kejahatan siber, penyebaran ideologi radikal, informasi palsu, dan tekanan dari luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak hanya memperhatikan lokasi geografis atau kekuatan militer, tetapi juga memahami dinamika sosial-politik serta perkembangan teknologi informasi secara mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Azizah (2021), pengertian keamanan harus diperbarui agar mencakup ancaman non-tradisional yang bersifat digital dan ideologis.

Selain itu, peran aktor non-negara semakin besar dalam memengaruhi stabilitas nasional. Kelompok-kelompok teroris, organisasi lintas negara, serta individu yang memiliki kemampuan teknologi tinggi bisa menjadi ancaman serius terhadap keamanan bangsa. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pertahanan harus mampu mengenali dan menanggapi aktor-aktor tersebut dengan cara yang fleksibel dan berlandaskan informasi sosial. Pendekatan yang terlalu birokratis dan kaku berisiko tidak mampu menyelesaikan ancaman yang terus berubah dan tidak terduga. Hal ini terlihat dari penelitian Indrawan dan Aji (2019) yang menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas lebih efektif dalam program deradikalisasi dibandingkan pendekatan yang bersifat keras dan represif.

Perumusan kebijakan publik di bidang pertahanan dan keamanan juga harus menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi antara ilmu politik, teknologi informasi, psikologi, dan sosiologi sangat penting dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi serta lebih mampu merespons ancaman yang rumit. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu memahami masyarakat sebagai pihak yang aktif, bukan hanya sebagai objek yang diperlakukan.

Di sisi lain, birokrasi di bidang pertahanan dan keamanan perlu direformasi agar lebih fleksibel dan cepat merespons perubahan lingkungan strategis. Reformasi ini mencakup peningkatan kemampuan pemimpin, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta pembentukan sistem kerja sama antar lembaga yang lebih efisien. Pemimpin yang memiliki visi dan bisa beradaptasi akan mendorong berkembangnya kebijakan yang inovatif, sedangkan birokrasi yang terbuka terhadap perubahan akan mempercepat pembuatan kebijakan di lapangan. Afandi dan Yoesgiantoro (2022) menekankan pentingnya penyiapan institusi yang siap menghadapi perubahan lingkungan strategis, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara.

Akhirnya, bekerja sama antara pendekatan ekologis dan non-ekologis menjadi sangat penting dalam membuat kebijakan pertahanan dan keamanan yang lengkap. Dengan cara ini, kebijakan yang dibuat akan lebih efektif, lebih mampu beradaptasi, dan lebih kuat menghadapi berbagai ancaman. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan yang baik adalah kebijakan yang mampu memahami perkembangan zaman, menggabungkan berbagai bidang ilmu, serta menangani ancaman dengan cara yang menyeluruh.

KESIMPULAN

Kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia telah bertransformasi dari domain militeristik tradisional menjadi sebuah sistem adaptif yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan non-ekologis, seperti dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika kebijakan pertahanan di Indonesia merupakan produk dari adaptasi ekologis birokrasi dalam merespons ancaman multidimensi dan hibrida kontemporer. Secara substantif, kebijakan pertahanan telah mengalami "ekologisasi" atau perluasan definisi ancaman, yang kini secara eksplisit mencakup keamanan iklim dan bencana alam. Perubahan paradigma ini dilegitimasi secara politik oleh kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan payung politik bagi aparat pertahanan dan keamanan (TNI/Polri) untuk mengambil peran sebagai aktor non-perang dan petugas siaga bencana di tingkat akar rumput.

Model implementasi kebijakan di tingkat lokal, seperti di Kampung Iklim Rawajati, menunjukkan efektivitas tertinggi ketika didukung oleh integrasi sosial-militer

dan faktor sosial-budaya. Keterbatasan ekonomi dan tantangan fisik berupa kepadatan pemukiman diatasi melalui budaya gotong royong dan inisiatif ProKlim, di mana Babinsa dan Bhabinkamtibmas bertindak sebagai jembatan komunikasi dan fasilitator antara otoritas formal dan struktur sosial komunitas. Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi digital berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik, memangkas "waktu tunda administrasi," dan memastikan respons real-time terhadap ancaman (banjir kiriman). Selain ancaman iklim, kebijakan pertahanan juga didorong oleh faktor non-ekologis lain, seperti geopolitik di Natuna Utara, ancaman siber, serta pentingnya ideologi dan budaya organisasi dalam penanganan terorisme. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan modern sangat bergantung pada kemampuan birokrasi untuk mengintegrasikan perspektif lintas disiplin dan menggabungkan analisis pendekatan ekologis (kondisi geografis) dengan pendekatan non-ekologis (sosial-politik dan teknologi).

Kebijakan pertahanan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan adalah kebijakan yang mampu memahami perkembangan zaman, menggabungkan berbagai bidang ilmu, serta menangani ancaman dengan cara yang menyeluruh. Model adaptif di Rawajati menjadi bukti nyata keberhasilan sistem administrasi publik Indonesia dalam mengolah dan merespons seluruh input non-ekologis demi mewujudkan ketahanan nasional dari ancaman hibrida.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. G., & Yoesgiantoro, D. (2022). Analisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan perairan Natuna Utara. *Jurnal Pertahanan*, 8(2), 189–204. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2839/pdf>
- Azizah, R. R. Z. H. (2021). Mendefinisikan kembali konsep keamanan dalam agenda kebijakan negara-bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/1954/1007/>
- Hajar, S., & Emelia, D. (2025). Upaya meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(2), 87–93. <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/343>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas program deradikalisasi BNPT terhadap narapidana terorisme. *Jurnal Bela Negara*, 5(2), 123–135. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020–2024. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/85UjAbwOLcPTbYsYHWdzPOsXevY80Psdm1q1UDkD.pdf>
- Muflika Nur Fuaddah. 2021. China Ngotot Klaim 90 Persen Wilayah Laut China Selatan hingga Bersengketa dengan Banyak Negara, Rupanya Ada Alasan Ini di Balikny. Diakses di website: <https://intisari.grid.id/read/032598067/china-ngotot-klaim-90-persen-wilayah-laut-china-selatan-hingga-bersengketa-dengan-banyak-negara-rupanya-ada-alasan-ini-di-balikny?page=all>
- Poltak Partogi Nainggolan. 2013. Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia. Diakses di website: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf
- Sjamsoeddin, S., Yusgiantoro, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Transformational bureaucratic leadership model to support national defense policy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1). <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/70204>
- SKPT Natuna Kementrian Kelautan dan Perikanan, diakses di website: <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>.